

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kontribusi dan rasio keuangan daerah Kota Padang selama periode 2020-2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah tergolong dalam kategori sedang, Meskipun sempat mengalami peningkatan hingga tahun 2023, namun pada tahun 2024 kontribusi PAD menurun, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya stabil.
2. Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pendapatan Daerah yang masuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa DBH belum menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi Kota Padang.
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tren yang cenderung membaik dari tahun 2020 hingga 2023. Namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2024 yang menandakan kemampuan daerah membiayai belanja sendiri masih terbatas.
4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah masih tergolong tinggi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan pemerintah daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat, sehingga ketergantungan fiskal masih menjadi tantangan utama.
5. Pertumbuhan PAD mengalami fluktuasi yang signifikan. Setelah mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2021 dan 2022, PAD

mengalami kontraksi pada 2023 dan 2024. Ini mengindikasikan perlunya pembenahan dalam strategi pengelolaan pendapatan asli daerah.

6. Secara keseluruhan, kondisi keuangan Kota Padang selama periode 2020-2024 menunjukkan ada perbaikan dalam beberapa aspek, tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah dan ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi. Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas utama.

4.2. Saran

Saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil analisis ini adalah sebaiknya Pemerintah Kota Padang lebih fokus dalam menggali potensi sumber-sumber PAD, meningkatkan kinerja pemungutan pajak dan retribusi dengan bantuan teknologi digital, serta mendorong kerja sama ekonomi lokal untuk memperluas basis pendapatan daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan evaluasi anggaran secara berkala juga penting dilakukan. Pemerintah daerah juga perlu memperjuangkan alokasi dana dari pusat yang lebih adil dan sesuai kebutuhan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kota Padang dapat membangun kemandirian fiskal yang lebih kuat dan berkelanjutan.